

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENAMBANG YANG MERUSAK
JALAN NASIONAL**



Oleh

**INDRA WAHYU RAMADHANI
NIM.2220215310095**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAMBANG
YANG MERUSAK JALAN NASIONAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**INDRA WAHYU RAMADHANI
NIM.2220215310095**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAMBANG
YANG MERUSAK JALAN NASIONAL**

**Nama : INDRA WAHYU RAMADHANI
NIM : 2220215310095**

**Disetujui,
Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

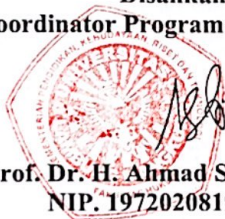
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



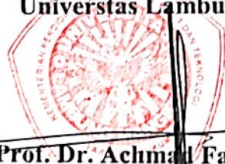
**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001
Tesis Ini Telah Dipertahankan**

Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 18 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Ifprani, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. (Pembimbing).

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- "keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba"- Walt Disney
- "Terus berjuang menggapai mimpi sebagai dedikasi ketekunan dalam mewujudkan impian"
- "inna fatahna laka fathan mubina"- Q.S. Al Fath ayat (1) "sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata"

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan Rahmat-Nya serta Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wasallam atas perjuangan menegakkan Ajaran Islam.
- Kedua orang tua, yang telah memberikan kasih sayang serta do'a dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Teman Sejawat.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Wahyu Ramadhani
NIM : 2220215310095
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Tesis :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAMBANG YANG MERUSAK JALAN NASIONAL”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis/disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Indra Wahyu Ramadhani

NIM 2220215310095

INDRA WAHYU RAMADHANI. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Penambang Yang Merusak Jalan Nasional". Program Magister Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. 100 Halaman.

RINGKASAN

Rusaknya jalan nasional KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang mengakibatkan dilakukan penutupan total untuk seluruh kendaraan bermotor sehingga tidak dapat melintas, yang mana dalam hal ini masyarakat sangatlah dirugikan karena jalan alternative yang disediakan oleh pemerintah pun dalam kondisi yang tidak memadai. Padahal jalan Nasional yang peruntukannya untuk masyarakat dan dibangun berdasarkan dana APBN, dan berdasarkan berita tidak adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab, para perusahaan tambang hanya dikenakan biaya CSR yang mana dari seluruh penambang di Banjarmasin tidak semuanya bersedia untuk membantu perbaikan jalan Nasional Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban pidana dalam menangani longsor Km 171 kecamatan satui, karena dengan adanya sanksi pidana akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya longsor susulan pada jalan nasional di sekitaran pertambangan yang mana sangat merugikan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional dan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat angkutan tambang.

Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal research. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitian

hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum Primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang dihadapi. Kemudian bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Efektivitas Hukum pada pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat pertambangan dimana dapat dikenakan kepada tiga pihak yaitu badan usaha, orang yang memberi perintah dan pengurus yang melakukan tindak pidana. Namun sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Sehingga efektivitas hukum tidak terlalu menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dengan mengakibatkan jalan nasional mengalami longsor dan tanpa adanya pertanggung jawaban secara pidana mengakibatkan longsor pada jalan nasional hanya dianggap sebagai bencana alam, ditambah lagi pemerintah sebagai penyelenggara jalan terlihat terlalu lambat melakukan tindakan perbaikan karena masalah anggaran biaya yang dimana dimintakan kepada para korporasi di bidang pertambangan, yang mana para korporasi hanya memberikan dalam bentuk sumbangan bukan dalam bentuk kewajiban dikarenakan tidak adanya pihak-pihak yang dinyatakan bersalah secara hukum. sehingga jalan nasional yang terkena dampak longsor menjadi beban negara karena perbaikannya menggunakan biaya dari APBN. Kebijakan dalam menerapkan hukum terhadap para penambang tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana pertambangan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum harus memberikan perlindungan hukum terutama terhadap masyarakat selaku pengguna jalan Nasional dengan pemberian sanksi pidana yang dianggap tepat dan rasional untuk dijatuhkan terhadap penambang yang mengakibatkan longsor pada jalan Nasional.

INDRA WAHYU RAMADHANI. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Penambang Yang Merusak Jalan Nasional". Program Magister Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. 100 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Jalan Nasional, Pertambangan.

Jalan Nasional sekitaran tambang dibangun dari pajak masyarakat, mengalami banyak kerusakan dan mengakibatkan longsor sebagaimana Jalan Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Adapun permasalahan penelitian ini ialah Bagaimana sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat angkutan tambang. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal research dan bersifat preskriptif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, sekunder, tersier. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** Sanksi terhadap penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan Nasional sudah diatur dalam perturan perundang-undangan, terdapat tiga sanksi yaitu secara administrasi yaitu pencabutan izin, secara perdata sebagai perbuatan melawan hukum dan secara pidana pelanggaran terhadap Undang-undang minerba, Undang-undang lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya. **Kedua** Pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan Nasional akibat pertambangan dapat dilihat dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penambang akibat melanggar jarak galian tambang, akibat melakukan penambang liar, dan akibat tidak dilakukannya reklamasi lahan bekas tambang, serta akibat pencemaran lingkungan

INDRA WAHYU RAMADHANI. 2024. "Criminal Liability of Miners Who Damage National Roads". Master of Law Program, Faculty of Law. Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 100 Pages

ABSTRACT

Keywords: Criminal Liability, National Roads, Mining.

The National Road around the mine was built from community taxes, experienced a lot of damage and resulted in landslides, as did the National Road Kilometer 171, Satui District, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan. The problem of this research is: What are the sanctions against miners who cause damage to national roads and what is the criminal responsibility for damage to national roads due to mining transportation. The type of research is normative juridical. This research uses doctrinal research and is prescriptive in nature. Using a statutory approach and a conceptual approach. Legal research sources are obtained from literature. The collection of legal materials is carried out by means of library research which includes primary, secondary and tertiary sources. Processing of legal materials is carried out deductively. Then analyzed qualitatively.

The results of the research obtained are: Firstly, sanctions against miners who cause damage to national roads have been regulated in statutory regulations, there are three sanctions, namely administratively, namely revocation of permits, civilly as an unlawful act and criminally as a violation of the Mineral and Coal Law, Law -environmental laws and other statutory regulations. Second, criminal responsibility for damage to national roads due to mining can be seen from various violations committed by miners due to violating the mining excavation distance, due to illegal mining, and due to not reclaiming ex-mining land, as well as due to environmental pollution.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAMBANG YANG MERUSAK JALAN NASIONAL”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat; sekaligus selaku Dosen Pembimbing Penulisan Tesis, yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu bersedia untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terhormat Seluruh Dosen Penguji Tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

Indra Wahyu Ramadhani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka	20
F. Metode Penelitian	43
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	48
BAB II	
SANKSI TERHADAP PENAMBANG YANG	
MENGAKIBATKAN KERUSAKAN PADA JALAN	
NASIONAL	49
A. Sanksi Terhadap Penambang	55
B. Analisis Hukum Terhadap Sanksi Terhadap Penambang	
Yang Mengakibatkan Kerusakan Pada Jalan Nasional	
Dikaitkan Dengan Teori Perlindungan Hukum Dan Teori	
Penegakan Hukum	72

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERUSAKAN JALAN NASIONAL AKIBAT PERTAMBANGAN	79
	A. Penegakan Hukum Pidana Atas Kerusakan Jalan Nasional Akibat Angkutan Tambang.....	79
	B. Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kerusakan Jalan Nasional Akibat Pertambangan Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas.....	92
BAB IV	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP